



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 9109-9117

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT), dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat (Studi Penelitian di Desa Moutong Timur, Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong)

Siti Mutia Dunggio¹, Rauf A. Hatu², Sainudin Latore³

^{1,2}Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

¹mutiadunggio1203@gmail.com, ²raufhatu@ung.ac.id, ³sainudinlatore@ung.ac.id

Abstrak

Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih menjadi persoalan utama di masyarakat pedesaan, termasuk di Desa Moutong Timur, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dipandang sebagai instrumen kebijakan sosial yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak BLT dalam menggerakkan ekonomi masyarakat Desa Moutong Timur serta mengkaji efektivitas mekanisme penyaluran bantuan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, sedangkan penentuan informan dilakukan secara purposive sampling yang melibatkan pemerintah desa, penerima BLT aktif, dan mantan penerima BLT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BLT memberikan dampak positif terhadap peningkatan daya beli rumah tangga, pemenuhan kebutuhan pokok, serta penguatan aktivitas ekonomi lokal melalui peningkatan konsumsi masyarakat dan dukungan terhadap usaha kecil. Musyawarah desa dalam proses penyaluran BLT juga dinilai meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran penerima bantuan. Namun demikian, penelitian menemukan sejumlah kendala, terutama keterbatasan sistem pendataan dan munculnya potensi ketergantungan sebagian masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BLT efektif sebagai stimulus ekonomi jangka pendek di tingkat desa, tetapi keberlanjutan dampaknya memerlukan pendataan yang lebih akurat, pengawasan berkelanjutan, serta penguatan program pemberdayaan ekonomi agar bantuan tidak hanya bersifat konsumtif, melainkan juga produktif.

Kata Kunci: BLT, Ekonomi Masyarakat, Bantuan Sosial, Modal Sosial,

1. Latar Belakang

Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi hingga saat ini masih menjadi persoalan struktural yang dihadapi oleh berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, serta rendahnya kesempatan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kondisi ini lebih terasa di wilayah pedesaan yang sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor informal seperti pertanian, perikanan, dan usaha mikro dengan tingkat pendapatan yang tidak menentu. Ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan juga menyebabkan distribusi kesejahteraan masyarakat menjadi tidak merata. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menghadirkan berbagai kebijakan sosial dan ekonomi guna menekan angka kemiskinan dan menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat.

Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program ini merupakan bantuan sosial berupa uang tunai yang diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan sosial dengan tujuan membantu memenuhi kebutuhan dasar, menjaga daya beli masyarakat, serta mengurangi dampak tekanan ekonomi yang dialami rumah tangga miskin (Hasyim, 2017; Pebri, 2022). Kehadiran BLT menjadi salah satu instrumen perlindungan sosial yang penting, terutama pada kondisi ekonomi masyarakat yang rentan akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, inflasi, maupun ketidakstabilan pendapatan masyarakat desa. Melalui bantuan tunai tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat mempertahankan tingkat konsumsi rumah tangga sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan.

Dalam konteks pembangunan nasional, program BLT tidak hanya dipandang sebagai bentuk bantuan sosial semata, tetapi juga sebagai stimulus ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan tunai yang diterima masyarakat akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli bahan pangan, membayar

Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT), dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat (Studi Penelitian di Desa Moutong Timur, Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong)

biaya pendidikan anak, kebutuhan kesehatan, serta mendukung modal usaha kecil. Dengan meningkatnya konsumsi masyarakat, maka terjadi perputaran ekonomi di tingkat lokal yang dapat memberikan dampak positif terhadap pedagang kecil, pelaku usaha mikro, dan aktivitas ekonomi desa secara umum. Oleh sebab itu, efektivitas BLT tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang diberikan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menggerakkan aktivitas ekonomi lokal.

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih menghadapi persoalan kemiskinan yang cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah pada tahun 2023 mencapai 395,66 ribu jiwa. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang hidup dalam keterbatasan ekonomi dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah melalui berbagai program perlindungan sosial. Tingginya tingkat kemiskinan tersebut juga menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di wilayah pedesaan dan daerah pesisir.

Kabupaten Parigi Moutong sebagai salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah juga menghadapi tantangan ekonomi masyarakat yang cukup kompleks. Sebagian besar masyarakat di daerah ini menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan usaha kecil yang sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, harga hasil panen, serta akses pasar yang terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat cenderung tidak stabil. Desa Moutong Timur, Kecamatan Moutong, merupakan salah satu desa yang masyarakatnya masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor ekonomi tradisional. Dalam kondisi demikian, keberadaan program BLT dipandang sangat penting untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat desa (Putra dkk., 2023).

Program BLT di Desa Moutong Timur telah dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemerintah desa dan pemerintah pusat dalam membantu masyarakat miskin dan rentan sosial. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat fenomena menarik terkait penurunan jumlah penerima bantuan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tercatat sebanyak 122 keluarga, kemudian menurun menjadi 76 keluarga pada tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 58 keluarga pada tahun 2024. Penurunan jumlah penerima bantuan tersebut menunjukkan adanya proses seleksi dan pendataan yang semakin ketat agar bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Di sisi lain, penurunan jumlah penerima bantuan juga menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat, baik yang menerima maupun yang tidak lagi menerima bantuan.

Fenomena tersebut menjadi penting untuk dikaji karena efektivitas program BLT tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan yang diterima masyarakat, tetapi juga oleh ketepatan sasaran, transparansi pendataan, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat terhadap kondisi ekonomi mereka. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai persoalan seperti perbedaan persepsi masyarakat mengenai kriteria penerima bantuan, kecemburuan sosial, hingga adanya masyarakat yang merasa layak menerima namun tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi program bantuan sosial memerlukan pengelolaan yang baik serta keterlibatan masyarakat agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam menggerakkan ekonomi masyarakat di Desa Moutong Timur, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penyaluran BLT, terutama yang berkaitan dengan mekanisme pendataan, seleksi penerima bantuan, serta partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan program.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap pergerakan ekonomi masyarakat Desa Moutong Timur. Penelitian difokuskan pada bagaimana BLT memengaruhi daya beli masyarakat, aktivitas konsumsi rumah tangga, serta keberlangsungan usaha kecil di tingkat desa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat memanfaatkan bantuan yang diterima dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memperoleh gambaran yang mendalam mengenai pengalaman masyarakat penerima BLT dan proses implementasi kebijakan di tingkat desa.

Secara ilmiah, penelitian ini memiliki relevansi yang penting karena sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas BLT dari aspek ketepatan sasaran, distribusi bantuan, dan perubahan daya beli masyarakat (Tumbel dkk., 2021; Eni & Razak, 2022; Yendra & Wetsi, 2021). Penelitian ini menawarkan sudut pandang yang berbeda dengan menempatkan BLT sebagai instrumen penggerak ekonomi lokal melalui peningkatan konsumsi masyarakat, perputaran ekonomi desa, dan dukungan terhadap usaha mikro masyarakat. Dengan adanya bantuan tunai, masyarakat tidak hanya terbantu dalam memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memiliki peluang untuk mempertahankan aktivitas usaha kecil yang menjadi sumber penghasilan keluarga.

Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif modal sosial Robert D. Putnam untuk menjelaskan bahwa keberhasilan program BLT tidak hanya ditentukan oleh besaran bantuan yang diberikan, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan sosial, partisipasi masyarakat, dan kerja sama antara pemerintah desa dengan warga

dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Modal sosial yang kuat dapat menciptakan hubungan sosial yang harmonis, meningkatkan transparansi pelaksanaan program, serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung keberhasilan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam pengembangan kebijakan bantuan sosial yang lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengkaji dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam menggerakkan ekonomi masyarakat di Desa Moutong Timur, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong. Penelitian berfokus pada pengalaman dan kondisi nyata masyarakat penerima BLT dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait perubahan kondisi ekonomi, daya beli, dan aktivitas usaha masyarakat setelah menerima bantuan. Subjek penelitian terdiri atas penerima BLT aktif dan masyarakat yang sudah tidak lagi menerima BLT. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria tertentu, yaitu warga berusia produktif yang pernah atau masih menerima BLT, serta pihak pemerintah desa yang terlibat dalam pengelolaan program, seperti Kepala Desa dan Kepala Seksi Kesejahteraan (Kasi Kesra).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung aktivitas ekonomi dan pemanfaatan BLT oleh masyarakat. Wawancara dilakukan kepada penerima BLT, mantan penerima BLT, serta aparat desa guna memperoleh informasi mengenai dampak bantuan terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan mekanisme penyalurannya. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, foto, dan data penerima BLT dari pemerintah desa. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menggambarkan secara sistematis dampak BLT terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Desa Moutong Timur.

3. Hasil dan Diskusi

Dampak BLT terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu program bantuan sosial pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat miskin dan kelompok rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar serta menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga. Program ini menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, khususnya masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan rendah dan tidak menentu. Menurut Musfi dkk. (2021), BLT Dana Desa memiliki peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan membantu rumah tangga berpenghasilan rendah dalam menghadapi tekanan ekonomi. Kehadiran BLT diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran masyarakat sehingga kebutuhan dasar rumah tangga tetap dapat terpenuhi.

Dalam pelaksanaannya, dampak BLT tidak hanya dilihat dari tersalurkannya bantuan kepada masyarakat, tetapi juga dari perubahan kondisi ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat setelah menerima bantuan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana dampak BLT terhadap kondisi ekonomi masyarakat Desa Moutong Timur, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong. Peneliti melakukan wawancara dengan penerima bantuan aktif, mantan penerima BLT, serta aparat pemerintah desa yang terlibat dalam pengelolaan program bantuan sosial. Wawancara dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai pemanfaatan dana bantuan, perubahan daya beli masyarakat, serta pengaruh BLT terhadap keberlangsungan aktivitas ekonomi rumah tangga masyarakat desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) memberikan kontribusi positif terhadap kondisi ekonomi masyarakat Desa Moutong Timur. Sebagian besar informan menyatakan bahwa bantuan yang diterima digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga seperti membeli beras, minyak goreng, gula, kebutuhan dapur, biaya kesehatan, biaya pendidikan anak, serta kebutuhan harian lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa BLT membantu masyarakat dalam mempertahankan tingkat konsumsi rumah tangga di tengah kondisi ekonomi yang terbatas. Bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tidak tetap, bantuan tersebut menjadi sumber tambahan yang sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Selain digunakan untuk kebutuhan konsumtif, beberapa keluarga juga memanfaatkan sebagian dana bantuan untuk mendukung usaha kecil yang dijalankan keluarga, seperti berdagang makanan ringan, menjual hasil kebun, maupun usaha kecil lainnya. Pemanfaatan bantuan untuk kegiatan produktif tersebut menunjukkan bahwa BLT tidak hanya berfungsi sebagai bantuan jangka pendek, tetapi juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk mempertahankan keberlangsungan usaha ekonomi keluarga. Dengan demikian, BLT tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga ikut mendukung aktivitas ekonomi masyarakat desa agar tetap berjalan.

Pernyataan tersebut tercermin dari hasil wawancara dengan informan CN yang menyatakan:

“Bantuan yang diterima digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sebagian dimanfaatkan untuk membantu usaha kecil yang dijalankan keluarga. Dengan adanya bantuan tersebut, kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi dengan lebih baik dan beban ekonomi keluarga menjadi lebih ringan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam membantu mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga. Bantuan yang diterima mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat karena kebutuhan dasar keluarga dapat dipenuhi dengan lebih baik dibandingkan sebelum menerima bantuan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Desa Moutong Timur yang menyatakan:

“Program Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Bantuan tersebut membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari serta mengurangi beban ekonomi keluarga yang memiliki pendapatan rendah.”

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa melihat BLT sebagai program yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Keberadaan BLT dinilai mampu membantu masyarakat menghadapi kondisi ekonomi yang sulit, terutama bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal seperti petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil yang memiliki penghasilan tidak tetap.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa BLT tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga menjadi mekanisme stabilisasi ekonomi rumah tangga masyarakat desa. Dalam konteks masyarakat pedesaan yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan nelayan dengan tingkat pendapatan yang bergantung pada hasil panen dan kondisi alam, keberadaan BLT menjadi sumber pendapatan tambahan yang membantu menjaga ketahanan ekonomi keluarga. Bantuan tersebut membantu masyarakat mengurangi beban pengeluaran sehingga mereka tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok meskipun pendapatan utama mengalami penurunan.

Dalam perspektif teori modal sosial Robert D. Putnam, pemanfaatan bantuan untuk kebutuhan prioritas menunjukkan adanya norma sosial dan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara kolektif demi mempertahankan kesejahteraan keluarga. Putnam menjelaskan bahwa modal sosial terbentuk melalui jaringan sosial, kepercayaan, dan norma yang mendorong kerja sama sosial dalam masyarakat. Kondisi tersebut terlihat dari cara masyarakat memanfaatkan bantuan secara bijaksana, tidak hanya untuk konsumsi jangka pendek, tetapi juga untuk mendukung aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Musfi dkk. (2021) yang menjelaskan bahwa BLT memiliki peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat serta membantu pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga miskin. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa dampak BLT di Desa Moutong Timur tidak hanya terbatas pada peningkatan konsumsi rumah tangga, tetapi juga mendukung keberlangsungan usaha ekonomi kecil masyarakat desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa BLT memiliki dampak yang lebih luas terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, terutama dalam menjaga perputaran ekonomi lokal di tingkat desa.

Dengan demikian, BLT memiliki kontribusi tidak hanya dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga dalam menjaga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan pada kondisi ekonomi yang terbatas. Keberadaan BLT menjadi salah satu bentuk perlindungan sosial pemerintah yang mampu membantu masyarakat mempertahankan stabilitas ekonomi rumah tangga sekaligus mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat desa.

Modal Sosial dalam Implementasi BLT

Modal sosial merupakan unsur penting dalam pelaksanaan program bantuan sosial di tingkat masyarakat. Menurut Robert D. Putnam (2000), modal sosial terdiri atas kepercayaan (trust), jaringan sosial (social network), norma sosial, dan kerja sama yang mampu memperkuat hubungan antara masyarakat dan institusi sosial. Modal sosial berfungsi sebagai perekat hubungan sosial yang dapat menciptakan solidaritas, partisipasi, dan kerja sama dalam kehidupan masyarakat. Dalam kpelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT), keberadaan modal sosial menjadi faktor yang sangat penting karena mampu mendukung kelancaran pelaksanaan program bantuan sosial, memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat, serta meminimalkan potensi konflik sosial yang dapat muncul selama proses penyaluran bantuan.

Dalam pelaksanaan BLT, modal sosial dapat dilihat melalui transparansi penyaluran bantuan, hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program, serta adanya komunikasi yang terbuka dalam penyampaian informasi terkait bantuan sosial. Hubungan sosial yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat akan mempermudah proses pendataan, verifikasi penerima bantuan, hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebaliknya, lemahnya modal sosial dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sehingga berpotensi memunculkan konflik sosial, kecemburuan sosial, dan persepsi ketidakadilan dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Menurut Mamonto dkk (2025), kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pelaksanaan BLT terbentuk

melalui transparansi informasi, kejelasan kriteria penerima, dan konsistensi penyaluran bantuan. Modal sosial yang baik, seperti komunikasi terbuka dan hubungan harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat, dapat mendukung kelancaran pendataan hingga penyaluran bantuan, sedangkan lemahnya modal sosial dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan konflik di masyarakat.

Untuk mengetahui bagaimana modal sosial berperan dalam implementasi BLT di Desa Moutong Timur, peneliti melakukan wawancara dengan pemerintah desa, pengelola BLT, tokoh masyarakat, serta masyarakat penerima bantuan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, keterbukaan informasi dalam pelaksanaan bantuan, pola komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, serta bentuk kerja sama masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program BLT. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi terhadap proses penyaluran bantuan dan interaksi sosial yang terjadi selama pelaksanaan program bantuan sosial di lingkungan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi BLT di Desa Moutong Timur tidak hanya ditentukan oleh besaran bantuan yang diterima masyarakat, tetapi juga oleh kuatnya modal sosial yang berkembang di lingkungan desa. Hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat berjalan cukup harmonis dan ditandai oleh adanya kepercayaan, keterbukaan informasi, dan kerja sama dalam proses pelaksanaan bantuan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa modal sosial menjadi salah satu faktor penting yang mendukung efektivitas pelaksanaan BLT di tingkat desa.

Salah satu informan menyatakan:

“Hubungan antara masyarakat dan pemerintah desa berjalan dengan baik. Informasi mengenai bantuan selalu disampaikan kepada masyarakat dan proses penyaluran bantuan dilakukan secara terbuka.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi menjadi salah satu bentuk modal sosial yang berkembang dalam pelaksanaan BLT di Desa Moutong Timur. Pemerintah desa berupaya memberikan informasi kepada masyarakat mengenai proses penyaluran bantuan, mekanisme pendataan penerima, serta tahapan pelaksanaan BLT. Keterbukaan informasi tersebut membantu menciptakan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah desa sehingga proses pelaksanaan bantuan dapat berjalan dengan lebih lancar dan minim konflik sosial.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Kepala Desa yang menyatakan:

“Pelaksanaan program BLT di Desa Moutong Timur berjalan dengan baik karena didukung oleh kerja sama antara pemerintah desa, BPD, kepala dusun, tokoh masyarakat, dan masyarakat penerima bantuan.”

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi BLT tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa semata, tetapi juga melibatkan berbagai unsur masyarakat desa. Keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala dusun, tokoh masyarakat, dan masyarakat penerima bantuan mencerminkan adanya jaringan sosial yang kuat dalam mendukung pelaksanaan program bantuan sosial. Jaringan sosial tersebut membantu pemerintah desa dalam melakukan pendataan, verifikasi kondisi ekonomi masyarakat, hingga pengawasan penyaluran bantuan agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa unsur kepercayaan (trust), jaringan sosial (social network), dan norma timbal balik (reciprocity) sebagaimana dijelaskan oleh Robert D. Putnam berperan penting dalam mendukung efektivitas program bantuan sosial. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa mempermudah proses komunikasi, pendataan, verifikasi, hingga penyaluran bantuan sehingga potensi konflik sosial dapat diminimalkan. Selain itu, adanya kerja sama antara masyarakat dan pemerintah desa juga membantu mempercepat proses pelaksanaan program bantuan sosial di tingkat desa.

Modal sosial yang kuat juga terlihat dari adanya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa yang dilakukan sebelum penetapan penerima bantuan. Dalam musyawarah tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan memberikan informasi mengenai kondisi ekonomi calon penerima bantuan. Keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut membantu pemerintah desa memperoleh data yang lebih akurat sehingga bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Partisipasi masyarakat tersebut menunjukkan adanya rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga keberhasilan pelaksanaan program bantuan sosial di lingkungan desa.

Selain itu, modal sosial juga tercermin dari adanya sikap saling membantu dan solidaritas sosial antarwarga masyarakat. Sebagian masyarakat penerima bantuan menyadari bahwa bantuan yang diterima merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga masyarakat cenderung mendukung proses pelaksanaan bantuan agar berjalan dengan baik. Sikap saling mendukung tersebut membantu menciptakan kondisi sosial yang lebih kondusif selama pelaksanaan program BLT. Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa modal sosial dalam implementasi BLT belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa mantan penerima BLT mengaku tidak memperoleh penjelasan yang memadai ketika

status penerima bantuan mereka dihentikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam aspek komunikasi publik dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Sebagaimana diungkapkan oleh informan Poni Ipo:

“Saya tidak dapat penjelasan yang jelas kenapa saya sudah tidak menerima lagi, padahal saya masih membutuhkan bantuan itu.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun hubungan sosial antara masyarakat dan pemerintah desa relatif baik, aspek transparansi informasi masih perlu ditingkatkan. Dalam perspektif Putnam, modal sosial yang kuat tidak hanya ditandai oleh adanya kerja sama sosial, tetapi juga oleh kemampuan institusi dalam menjaga keterbukaan informasi dan legitimasi di mata masyarakat. Ketika masyarakat tidak memperoleh penjelasan yang jelas mengenai perubahan status penerima bantuan, maka hal tersebut dapat menimbulkan keraguan, ketidakpuasan, bahkan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kejelasan informasi dan persepsi keadilan dalam proses seleksi penerima bantuan. Ketika masyarakat merasa bahwa proses penyaluran bantuan dilakukan secara terbuka, jujur, dan tepat sasaran, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa cenderung meningkat. Sebaliknya, ketidakjelasan informasi dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan yang berpotensi memengaruhi hubungan sosial di masyarakat.

Selain itu, kurangnya komunikasi yang efektif mengenai perubahan data penerima bantuan juga dapat memunculkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat merasa bahwa proses penghentian bantuan dilakukan tanpa penjelasan yang cukup sehingga menimbulkan kesalahpahaman terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas komunikasi publik agar masyarakat dapat memahami alasan perubahan status penerima bantuan serta mekanisme evaluasi data penerima BLT yang dilakukan secara berkala.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Siti Nurjanah (2025), yang menjelaskan bahwa transparansi informasi dalam pengelolaan program pemerintah berpengaruh terhadap tingkat partisipasi dan kepercayaan masyarakat. Dalam penelitian ini, keterbukaan informasi dari aparat desa menjadi faktor penting dalam menjaga hubungan sosial antara masyarakat dan pemerintah desa. Semakin baik komunikasi dan transparansi yang dibangun pemerintah desa, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan program bantuan sosial.

Dengan demikian, modal sosial dalam implementasi BLT tidak hanya terlihat dari adanya hubungan kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat, tetapi juga dari kemampuan pemerintah desa dalam menjaga transparansi, komunikasi, dan kepercayaan sosial selama pelaksanaan program bantuan sosial. Modal sosial yang kuat akan membantu menciptakan pelaksanaan program bantuan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu diterima dengan baik oleh masyarakat. Selain itu, keberadaan modal sosial juga menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat desa sehingga program bantuan sosial dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Mekanisme Pendataan dan Seleksi Penerima BLT

Pendataan dan seleksi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan tahapan yang sangat penting dalam memastikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Proses pendataan yang tepat akan menentukan keberhasilan program bantuan sosial, karena ketepatan sasaran penerima bantuan menjadi salah satu indikator utama efektivitas pelaksanaan BLT di tingkat desa. Menurut Wulandari dan Suryani (2022), proses pendataan dan seleksi penerima BLT harus dilakukan secara akurat dan objektif agar bantuan tidak salah sasaran serta mampu menjangkau kelompok masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi paling rentan. Selain itu, Lonteng dkk. (2022) menegaskan bahwa pengawasan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pendataan sangat diperlukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program bantuan sosial.

Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pendataan dan seleksi penerima BLT di Desa Moutong Timur, peneliti melakukan wawancara dengan kepala desa, aparat desa, pengelola BLT, serta beberapa masyarakat penerima bantuan yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan program. Wawancara dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai tahapan pendataan, proses verifikasi penerima bantuan, serta kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam menentukan masyarakat yang layak menerima bantuan. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi terhadap proses administrasi dan mekanisme musyawarah desa yang dilaksanakan sebelum penetapan penerima bantuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendataan dan seleksi penerima BLT di Desa Moutong Timur dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu musyawarah desa, verifikasi lapangan, validasi data administrasi, dan penilaian kondisi ekonomi calon penerima bantuan. Pemerintah desa melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam proses tersebut, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala dusun, tokoh masyarakat, dan aparat desa lainnya. Keterlibatan berbagai pihak tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah.

Kepala Desa Moutong Timur menyampaikan sebagai berikut:

“Pendataan penerima BLT dilakukan melalui musyawarah desa dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat”. Data yang diperoleh kemudian diverifikasi untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria dan benar-benar membutuhkan bantuan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa berupaya menerapkan prinsip partisipatif dalam proses penentuan penerima bantuan. Melalui musyawarah desa, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan memberikan informasi mengenai kondisi ekonomi calon penerima bantuan. Proses tersebut membantu pemerintah desa memperoleh data yang lebih akurat mengenai masyarakat yang layak menerima BLT.

Selain melalui musyawarah desa, pemerintah desa juga melakukan verifikasi lapangan secara langsung untuk memastikan kondisi ekonomi masyarakat sesuai dengan data yang telah dikumpulkan. Verifikasi dilakukan dengan melihat kondisi rumah tangga, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, serta kondisi sosial ekonomi calon penerima bantuan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan pendataan maupun penerima bantuan yang tidak sesuai kriteria.

Dalam proses administrasi, calon penerima BLT diwajibkan melengkapi dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai bentuk validasi identitas penerima bantuan. Pemerintah desa juga melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan agar seluruh proses administrasi berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Koordinasi tersebut penting dilakukan untuk memastikan data penerima bantuan tersusun secara tertib dan tidak terjadi tumpang tindih data dengan program bantuan sosial lainnya.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan lain yang menyatakan:

“Proses seleksi penerima bantuan dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat sehingga bantuan dapat tepat sasaran.”

Selain itu, informan Hasmi Lagandja mengungkapkan:

“Proses pendataan dilakukan secara langsung oleh pemerintah desa dan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan sesuai dengan kondisi ekonomi yang dimiliki.”

Keterangan para informan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa berusaha menjalankan proses pendataan secara objektif dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat secara langsung. Pendekatan tersebut membantu pemerintah desa dalam menentukan prioritas penerima bantuan, khususnya bagi masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan rendah, kehilangan mata pencaharian, atau mengalami kesulitan ekonomi yang cukup berat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme seleksi penerima BLT di Desa Moutong Timur telah mengadopsi prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana direkomendasikan dalam berbagai kajian mengenai tata kelola bantuan sosial. Penurunan jumlah penerima BLT dari tahun ke tahun bukan menunjukkan berkurangnya akses masyarakat terhadap bantuan, melainkan merupakan hasil dari proses evaluasi dan pemutakhiran data penerima agar bantuan semakin tepat sasaran. Pemerintah desa melakukan penyesuaian data penerima berdasarkan perubahan kondisi ekonomi masyarakat sehingga bantuan dapat difokuskan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan adanya beberapa kendala dalam proses pendataan dan seleksi penerima bantuan. Sebagian mantan penerima BLT mengaku merasa kurang puas karena tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai alasan penghentian bantuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa akurasi data dalam penetapan penerima bantuan perlu diimbangi dengan komunikasi yang efektif dan transparan agar tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat. Menurut Sari dkk. (2025), transparansi dalam sektor publik berkaitan dengan keterbukaan pemerintah atau organisasi dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan, pengelolaan program, serta pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat secara jelas, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi tersebut penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah munculnya kesalahpahaman dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Oleh karena itu, kurangnya keterbukaan informasi mengenai perubahan status penerima bantuan dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Selain itu, pemerintah desa juga menghadapi tantangan dalam menyesuaikan data penerima bantuan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang terus berubah. Beberapa masyarakat yang sebelumnya layak menerima bantuan tidak lagi memenuhi kriteria, sementara masyarakat lain mengalami penurunan kondisi

ekonomi dan perlu dimasukkan sebagai penerima baru. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendataan penerima BLT harus dilakukan secara berkala agar tetap akurat dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan Kamuli dkk. (2023) yang menjelaskan bahwa kendala penyaluran BLT dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran dan penentuan kriteria penerima bantuan. Dalam penelitian ini, penurunan jumlah KPM BLT tidak hanya disebabkan oleh evaluasi data penerima, tetapi juga karena keterbatasan dana desa sehingga pemerintah desa harus melakukan seleksi ulang dan memprioritaskan masyarakat yang paling membutuhkan bantuan.

Hasil penelitian ini mendukung temuan Saragih dkk (2021), yang menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan BLT serta sejalan dengan Wulandari dkk (2022), yang menegaskan bahwa validitas data menjadi faktor utama keberhasilan program bantuan sosial. Kontribusi akademik penelitian ini terletak pada penjelasan bahwa ketepatan sasaran bantuan tidak hanya ditentukan oleh kualitas pendataan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah desa dalam membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat. Dengan demikian, mekanisme pendataan dan seleksi penerima BLT yang baik akan membantu menciptakan pelaksanaan bantuan sosial yang lebih efektif, adil, dan mampu memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) berperan dalam menggerakkan ekonomi masyarakat Desa Moutong Timur melalui peningkatan daya beli, pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga, dan dukungan terhadap aktivitas ekonomi lokal. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa BLT membantu meringankan beban ekonomi masyarakat berpendapatan rendah serta memberikan ruang bagi sebagian penerima untuk mendukung usaha kecil yang dijalankan. Selain itu, efektivitas pelaksanaan BLT didukung oleh modal sosial yang tercermin dalam kepercayaan, kerja sama, dan partisipasi masyarakat dalam proses penyaluran bantuan. Mekanisme pendataan dan seleksi penerima yang dilakukan melalui musyawarah desa dan verifikasi lapangan juga berkontribusi terhadap ketepatan sasaran bantuan. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis dampak BLT dalam menggerakkan ekonomi masyarakat Desa Moutong Timur telah terjawab, yaitu bahwa BLT tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial, tetapi juga sebagai stimulus yang mendukung perputaran ekonomi di tingkat desa. Secara teoritis, hasil penelitian memperkuat relevansi teori modal sosial Robert D. Putnam yang menempatkan kepercayaan, jaringan sosial, dan norma kerja sama sebagai faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan transparansi, akurasi pendataan, dan efektivitas penyaluran bantuan sosial. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu desa dengan pendekatan kualitatif sehingga temuannya belum dapat digeneralisasi secara luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan wilayah yang lebih luas serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak BLT terhadap perekonomian masyarakat.

Referensi

1. Eni, S., & Razak, A. (2022). Dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap Daya Beli Masyarakat. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 8(2), 102–113.
2. Hasyim, H. (2017). Reksadana Syariah vs Reksadana Konvensional: Analisis Pertumbuhan dan Perkembangan Tahun 2010–2016. *Al-Iqtishad*, 11(13), 122–136.
3. Kamuli, S., Lasimpala, A., & Olii, N. (2023). Faktor penghambat penyaluran Bantuan Langsung Tunai melalui Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 di Desa Iloheluma. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 11(1), 100–112. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/9733>
4. Lonteng, A., Palar, N., & Rorong, J. (2022). Pengawasan dan Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 6(4), 144–156.
5. Mamonto, A., Aneta, Y., & Nani, Y. N. (2025). Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(9). <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1321>
6. Musfi, M., Hasanah, N., & Kurniawan, D. (2021). Peran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(3), 120–132.
7. Nurjanah, S. (2025). Transparansi Program Pemerintah dan Pengaruhnya terhadap Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Administrasi Negara*, 13(1), 88–99.
8. Pebri, I. (2022). *Implementasi Kebijakan Permensos Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial*. Universitas Islam Riau. <https://repository.uir.ac.id/11578/>
9. Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
10. Putra, A., Rahman, S., & Yusuf, M. (2023). Peran Bantuan Sosial dalam Mendukung Ekonomi Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(1), 77–89.
11. Saragih, J. P., Budiyantri, E., Silalahi, S. A. F., & Surya, T. A. (2021). *Dana Desa dalam Pandemi Covid-19: Kesehatan Masyarakat dan Kebangkitan Ekonomi*. Publica Indonesia Utama. <https://scholar.google.com/scholar?q=Saragih+Budiyantri+Silalahi+Surya+2021+Dana+Desa+dalam+Pandemi+Covid-19>

12. Sari, O. D. S., & Hidayat, M. T. (2025). Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Opd Kota Surabaya. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 49-59.
13. Tumbel, F., Kaunang, M., & Londa, V. (2021). Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(99), 1–10.
14. Wulandari, D., & Suryani, E. (2022). Akurasi Pendataan Penerima Bantuan Langsung Tunai dalam Perspektif Kebijakan Sosial. *Jurnal Governance*, 10(2), 67–78.
15. Yendra, Y., & Wetsi, R. (2021). Analisis Ketepatan Sasaran Program Bantuan Langsung Tunai pada Masyarakat Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(1), 55–66.